

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 November 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN
SUB UNIT KERJA : BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRE WAHYU YUDHANTORO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN BUMD BIDANG JASA DAN PRODUKSI**
3. NHK : **768148**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KOTA SEMARANG
, WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **502.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV HATCHBACK Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **20.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **53.805.346**

F. HARTA LAINNYA Rp. **100.000.000**

Sub Total Rp. **2.175.805.346**

III. HUTANG Rp. **395.486.650**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.780.318.696**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 Desember 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.